Kemenkominfo Terima 572.000 Aduan Nomor Rekening Terkait Penipuan Online

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, sejak 2017 hingga 2024, Kementerian Kominfo melalui layanan cekrekening.id telah menerima 572.000 aduan nomor rekening terkait penipuan online.

"Kementerian Kominfo melalui layanan cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan, mencatat sebanyak 572.000 aduan terkait fraud atau penipuan online yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2024," ujar Nezar di Jakarta, Selasa (3/9).

Nezar menjelaskan, jenis penipuan yang mendominasi adalah penipuan jual beli online sebanyak 528.415 aduan dan investasi fiktif online sebanyak 43.770 aduan.

Disadari, perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data dan sistem di Indonesia. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, ancaman keamanan siber pun turut meningkat secara signifikan.

Menurut data dari National Cyber Security Index (NCSI) pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-49 dari 176 negara dalam hal serangan siber. Di Kawasan ASEAN, jumlah serangan siber di Indonesia berada di urutan kelima.

Adapun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat adanya ratusan juta serangan siber setiap tahunnya. Pada 2023 saja, terdapat 279 juta serangan siber yang terdeteksi. Jumlah ini menurun 24 persen dibandingkan 2022 yang mencatat 370,02 juta serangan.

Nezar mengatakan, untuk melindungi ekosistem digital di Indonesia serta memastikan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan siber, Kementerian Kominfo telah menyusun berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi ruang digital Indonesia.

Salah satu regulasi tersebut adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Regulasi ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mengelola aktivitas di ranah elektronik dan digital agar lebih aman dan tepercaya," katanya. **(Ant/San)-d**

KINERJA KEUANGAN MONCER

Laba BSI Tumbuh 20,28%

KR-Istimewa

Dirut BSI Hery Gunadi (tengah) memaparkan laporan keuangan.

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja keuangan sangat impresif pada Kuartal II-2024. Per Juni 2024, laba bersih BSI mencapai Rp 3,4 triliun, tumbuh 20,28 persen secara tahunan, menjadikan perseroan menorehkan pertumbuhan tertinggi di antara Top 10 bank di Indonesia.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, perseroan berhasil menjaga kinerja keuangan dan bisnis secara sehat dan berkualitas sepanjang Kuartal II-2024, di tengah makroekonomi cukup menantang yang ditandai naiknya suku bunga acuan seperti BI Rate yang naik ke level 6,25 persen pada awal Kuartal II-2024 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

"Alhamdulillah, pertumbuhan BSI dalam berbagai indikator kunci, seperti aset, DPK, laba bersih, dan rasio CASA, merupakan yang tertinggi di industri perbankan nasional. Prestasi ini bukti bahwa BSI sebagai bank syariah mampu bersaing dan unggul di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif. Pertumbuhan yang konsisten di berbagai aspek ini juga mencerminkan solidnya kinerja BSI yang berkelanjutan," kata Hery di Jakarta, Selasa (3/9).

Ia menjelaskan, capaian kinerja tersebut antara lain buah dari konsistensi manajemen menerapkan strategi bisnis perusahaan untuk fokus tumbuh sustain pada segmen ritel, konsumer dan UMKM baik dari sisi dana maupun pembiayaan.

Saat ini komposisi dana murah mencapai 62,05 persen, sementara komposisi pembiayaan 71,73 persen berada di segmen ritel dan konsumer termasuk UMKM. Pada sisi lain baik dari sisi overhead cost maupun kualitas kredit terjaga dengan baik. **(Ogi)-f**

DEWAS KPK PUTUSKAN SIDANG KODE ETIK

Gugatan Nurul Ghufron Tak Diterima PTUN

JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan putusan sidang kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Jumat depan. Putusan dibacakan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang dilayangkan Ghufron.

"Rencana Jumat akan diputus (sidang kode etik). Perkara di PTUN telah diputus," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/9).

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Ghufron terdaftar dengan nomor 142/G/TF/ 2024/PTUN.JKT dengan penggugat Nurul Ghufron dan tergugat Dewas KPK, telah diputus oleh majelis hakim PTUN pada Selasa (3/9). Amar putusan pokok perkara menyatakan gugatan Ghufron tidak dapat diterima serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000.

Dalam amar putusan tersebut, juga disebutkan majelis hakim menerima eksepsi yang disampaikan Dewas KPK tentang kompetensi absolut pengadilan. PTUN kemudian mencabut penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/TF/ 2024/ PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik Atas Nama Terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/ 02/2024 tertanggal 21 Februari 2024.

Sebelumnya, Dewas KPK pada Selasa, 21 Mei 2024 menunda pembacaan putusan sidang kode etik terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Penundaan tersebut dilakukan berdasarkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik dan pedoman perilaku Ghufron.

"Oleh karena kami sudah mendapat penetapan yang memerintahkan kami untuk menunda, maka sesuai dengan kesepakatan dari pada majelis, maka persidangan ini kami tunda untuk waktu sampai dengan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Dewan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Majelis Sidang Kode Etik KPK dalam sidang yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan. **(Ant/Has)-f**

417 Pelaku Korupsi dari Sektor Usaha

BATAM (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencatat 417 dari 1.647 pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus dari sektor usaha. Sehingga kasus korupsi didominasi kaitannya dengan sektor usaha.

"Tadi disebutkan kita sudah menangani 1.647 pelaku korupsi, dari sekitar itu, 417 di antaranya adalah pelaku usaha. Justru kelompok yang paling banyak dan hampir 25 persen yang kita tangani itu adalah sektor swasta," ujar Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Jhonson Ridwan Ginting di Batam, Selasa (3/9).

Menurutnya, angka tersebut terhitung sejak tahun 2005-2024. Dunia usaha memiliki peranan lebih tinggi, karena semua korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, biasanya bekerja sama dengan para pelaku usaha. "Kami, KPK berdasarkan UU, hanya menangani aparat penegak hukum, atau penyelenggara negara, dan kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar," ujar Jhonson.

Dikatakan pula, KPK menerima sebanyak 39 pengaduan masyarakat soal kasus korupsi di Kepri, yang didominasi oleh pengadaan barang dan jasa. "Kita tidak paham juga, apakah kemudian angkanya besar atau kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, angkanya relatif lebih kecil," bebernya.

Dengan begitu, KPK melakukan upaya pemberantasan korupsi, utamanya dengan membekali kepada seluruh SDM tentang pentingnya menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas agar praktik korupsi tidak terjadi di lingkungannya.

"Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga menyebabkan rusaknya demokrasi, hingga meningkatnya pengangguran. Tugas memberantas korupsi adalah tugas kita bersama dengan turut peran serta masyarakat," kata Jhonson. **(Ant/Has)-f**

Keteladanan

Sambungan hal 1

"Kami diberikan batasan usia bagi yang sudah 70 tahun ke atas tidak boleh ikut misa ke GBK. Karena pertimbangan kesehatan, mengingat di GBK nanti akan ada 86.000 orang yang hadir. Namun, bagi mereka yang tidak bisa datang langsung tidak perlu khawatir, karena di beberapa gereja termasuk Gereja Antonius Padua Kotabaru pada 5 September 2024 jam 17.00 WIB akan ada *live streaming* menyaksikan misa yang ada di GBK," jelasnya.

Sementara itu, PP Muhammadiyah menilai, di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional dan ranah global.

Pernyataan PP Muhammadiyah secara tertulis ditandatangani Ketum Haedar Nashir dan Sekum Abdul Mu'ti serta diterima *KR*, Selasa (3/9). Pernyataan disampaikan terkait kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, 3-6 September.

Bangsa Indonesia sebagai tuan rumah, menurutnya, sudah seharusnya menyambut dan menghormati kunjungan Paus Fransiskus dengan penuh keramahan dan kesantunan yang mencerminkan budaya dan peradaban Indonesia yang luhur.

Muhammadiyah, sebut Haedar, menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia dapat menjadikan pertemuan dengan Paus Fransiskus untuk menyampaikan dan mendialogkan masalah-masalah perdamaian dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya masalah Palestina. Indonesia penting menjadikan kedatangan dan pertemuan dengan Paus Fransiskus sebagai momentum mengambil prakarsa dan mengembangkan peran perdamaian dunia secara lebih proaktif.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memberikan apresiasi atas kunjungan tokoh Pemimpin Katolik di dunia ini, karena kedatangannya akan berdampak baik bagi Indonesia dalam rangka mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis.

"Kita tahu, Paus Fransiskus merupakan tokoh spiritual, pemimpin agama Katolik terbesar di dunia yang tentu memiliki pengaruh sangat kuat bagi upaya kita mendorong perdamaian dunia," tutur Ace dalam keterangannya, kemarin.

Kegiatan Misa Akbar yang akan dilakukan Paus Fransiskus dengan diikuti jemaat Katolik di Indonesia, Ace berharap tokoh kharismatik itu mendoakan bagi perdamaian Indonesia. Selain itu mendoakan kesejahteraan masyarakat.

Pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin pukul 11.26 WIB. Karpet merah tampak sudah disiapkan untuk menyambut pemimpin Vatikan tersebut.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, hingga Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus, Ignasius Jonan turut menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Pengamanan terlihat ketat saat Paus Fransiskus tiba.

Paus Fransiskus melakukan serangkaian kegiatan di Jakarta. Rabu (4/9), Paus melakukan kunjungan ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, Paus Fransiskus juga mengunjungi Gereja Katedral. Keesokan harinya, Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Panitia mengimbau umat Katolik yang tidak memiliki tiket menyaksikan misa secara live streaming.

Paus yang pernah melakukan kunjungan ke Indonesia adalah Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia saat ini adalah penantian setelah 35 tahun. **(Ria/Ful/Fsy)-d**

Polri

Sambungan hal 1

dan audit dari sejumlah pihak yang berwenang, baik dari internal maupun eksternal Polri," kata Trunoyudo ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/9).

Mengenai laporan koalisi masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi tersebut, Trunoyudo mengatakan bahwa Polri mengapresiasi seluruh kritik dan masukan yang diberikan.

Polri selalu bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. "Selama ini kami juga selalu berkoordinasi, komunikasi, serta kerja sama dengan lembaga KPK dalam setiap proses kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi," tandasnya. **(Ant/Has)-f**

Naik

Sambungan hal 1

Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik se-Dunia itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke Kedubes Vatikan di Jakarta. Di tempat itu pula Paus Fransiskus bermalam hingga Jumat (6/9).

Setelah bertemu Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (5/9) pagi Paus dijadwalkan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian pada pukul 17.00 WIB memimpin Misa Suci Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Terakhir pada Jumat (6/9), Paus Fransiskus meninggalkan Jakarta menuju Port Moresby Papua Nugini. **(Ant/Ati)-d**

Guguran

Sambungan hal 1

Berdasarkan analisis foto udara, volume kubah Barat Daya terukur sebesar 2.777.900 meter kubik dan kubah tengah 2.366.900 meter kubik.

Agus menyatakan, hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor Selatan-Barat Daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal 5 kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal 7 km).

Pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Jika terjadi erupsi eksplosif, ujarnya, maka lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau area dalam radius 3 km dari puncak gunung. **(Ant/San)-f**

Familisme

Sambungan hal 1

Pola demikian menjadi inspirasi keluarga elite saat ini menjalankan politik dinasti dengan menempatkan anak, menantu dan kerabat pada posisi-posisi strategis dalam roda pemerintahan.

Dinasti politik melalui pola familisme di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu by design dan by accident. Dinasti politik by design sesungguhnya telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa sehingga untuk merekayasa keberhasilan tujuannya.

Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara sistematis mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik.

Familisme sebagai budaya politik merupakan ketergantungan yang terlalu besar terhadap ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya.

Familisme juga dapat dipahami sebagai new social order yaitu dorongan psikologis bagi seseorang untuk mampu berkarier dalam dua ranah sekaligus: ranah publik sebagai birokrat dan ranah privat sebagai korporat-swasta.

Familisme (familism), yakni dinasti politik yang didasarkan pada hubungan darah secara langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Posisi keluarga politik yang lemah akan menguntungkan keluarga politik yang lebih kuat karena dianggap dapat menjamin eksistensi yang lemah. Loyalitas, kepatuhan, dan solidaritas keluarga merupakan nilai-nilai penting familisme dalam mempengaruhi corak dinasti politik.

Dinasti politik pada dasarnya tidak ada dalam demokrasi, walaupun sejarah mencatat dalam negara-negara demokrasi modern fenomena dinasti politik tumbuh berkembang. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Tidak dibenarkan jika mengatasnamakan dan konstitusi lantas kehidupan politik didominasi oleh sekelompok golongan tertentu, karena negara adalah milik bersama.

Setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik selama mendapat kepercayaan oleh rakyat. Proses pengawasan dan pembatasan yang berlaku selama ini hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Fakta yang terjadi di lapangan justru politik dinasti berkembang dan subur dalam lingkup negara demokrasi kita. Sistem yang berlaku dalam politik dinasti berdasarkan kedekatan secara personal bukan atas dasar kapasitas dan kualitas.

Familisme politik yang berkembang di Indonesia menjadi ancaman keberlangsungan dan masa depan perpolitikan di Indonesia. Selain memotong hak rakyat juga dapat melahirkan pemimpin yang tidak kompeten serta melahirkan neo-tirani (tirani dalam bentuk baru). Semoga!.

(Penulis, dosen Prodi Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta)-d

KPK

Sambungan hal 1

Nawawi membantah bila KPK sengaja berlama-lama dalam menangani kasus Kaesang. "Memang kita punya protap dalam kaitannya dengan penanganan yang seperti itu, dan sejauh ini saya pikir jalan sebagaimana biasanya. KPK juga tidak akan memberi perlakuan khusus ke Kaesang. Tidak ada. Semua orang di hadapan KPK sama," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil KPK Alexander Marwata mengaku telah menyusun konsep untuk meminta keterangan dari Kaesang Pangarep. Permintaan keterangan itu terkait laporan dugaan gratifikasi Kaesang buntut pemakaian jet pribadi Gulfstream G650 ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono. "Suratnya sedang dikonsep, surat undangan," ujarnya.

Menurut Alexander, KPK sesuai undang-undang telah dimandatkan untuk menindaklanjuti setiap dugaan kasus korupsi, termasuk gratifikasi. Meski dalam hal ini Kaesang bukan penyelenggara negara, namun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu memiliki keterkaitan dalam keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi. **(Ant/Has)-f**

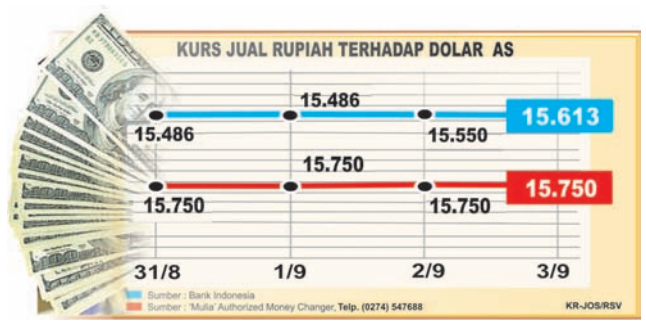

Prakiraan Cuaca — **4 September 2024**

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko